

**PENYELIDIKAN SEJARAH TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK
INDONESIA-BELANDA PADA KMB DAN ISU YANG BELUM
TERSELESAIKAN (1949-2017)**

“Sebuah Kajian Tentang Sejarah Pemikiran Diplomatik”

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**



Epa Juliarni

NIM. 2014/ 14046004

**PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang pada Hari
Rabu, 14 Agustus 2019**

**PENYELIDIKAN SEJARAH TENTANG KONFLIK INDONESIA-
BELANDA PADA KMB DAN ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN
(1949-2017)
“SEBUAH KAJIAN TENTANG SEJARAH PEMIKIRAN DIPLOMATIK”**

**Nama : Epa Juliarni
BP/ NIM : 2014/ 14046004
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, September 2019

Tim Penguji

**Ketua : Prof. Dr. Mestika Zed, M.A
Anggota : 1. Drs. Zul Asri, M.Hum
 2. Dr. Rusdi, M.Hum**

Tanda Tangan

**1. 
2. 
3. **

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENYELIDIKAN SEJARAH TENTANG KONFLIK INDONESIA-BELANDA PADA KMB DAN ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN
(1949-2017)

"SEBUAH KAJIAN TENTANG SEJARAH PEMIKIRAN DIPLOMATIK"

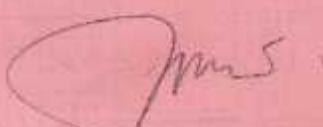
Nama : Epa Juliarni
BP/ NIM : 2014/ 14046004
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, September 2019

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Sejarah

Pembimbing



Dr. Erniwati, S.S, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2 001



Prof. Dr. Mestika Zed, M.A
NIP. 19550919 198203 1 003

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epa Juliarni
BP/ NIM : 2014/ 14046004
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul **Penyelidikan Sejarah Tentang Konflik Indonesia-Belanda pada KMB dan Isu Yang Belum Terselesaikan (1949-2017) "Sebuah Kajian Tentang Sejarah Pemikiran Diplomatik"** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Emiwati, S.S., M.Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

Saya yang menyatakan



Epa Juliarni
NIM. 14046004

ABSTRAK

Epa Juliarni. 2014/ 14046004. Penyelidikan Sejarah Tentang Konflik Indonesia-Belanda pada KMB dan Isu Yang Belum Terselesaikan (1949-2017). **Skripsi**. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2019.

Penelitian ini membahas masalah perebutan Irian Barat (Papua) antara Indonesia dengan Belanda (1949-2017). Masalah Irian Barat muncul semenjak diadakannya KMB. Dalam KMB, Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada RIS tetapi tidak termasuk Irian Barat, masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Di sini, Indonesia dan Belanda berbeda pandangan dalam menilai status Irian Barat. Belanda tetap ingin mempertahankan Irian Barat, tetapi di sisi lain Indonesia menginginkan Irian Barat masuk ke dalam wilayahnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dan kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber berupa buku, jurnal ilmiah, manuskrip dan surat kabar online yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu di perpustakaan UNP (pusat, fakultas dan jurusan) serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat. Kemudian dilakukan kritik sumber, interpretasi dan diakhiri dengan penulisan sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian, alasan utama Belanda menolak pengakuan Irian Barat adalah karena Irian Barat memiliki kekayaan alam yang luar biasa berupa emas dan tembaga. Hal ini diketahui Belanda bermula pada tahun 1936, ketika eksplorasi minyak Belanda-Amerika Serikat bekerja sama dalam sebuah misi mensponsori tiga orang pendaki (JJ. Dozy dan dua temannya) ke Pegunungan Papua, tempat mereka menemukan emas. Emas yang ditemukan di sini memiliki bobot kadar emas dua kali lipat dari pertambangan terbesar waktu itu.

Adapun penyelesaian masalah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda dilakukan dengan cara diplomasi dan militer. Masalah Irian Barat yang akhirnya dapat diselesaikan melalui PEPERA ternyata memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Masalah tersebut adalah OPM, Kasus Freeport dan OTSUS.

Kata kunci: KMB, Konflik, Irian Barat, PEPERA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Penyelidikan Sejarah Tentang Penyelesaian Konflik Indonesia-Belanda pada KMB dan Isu Yang Belum Terselesaikan (1949-2017) “Sebuah Kajian Tentang Sejarah Pemikiran Diplomatik”**. Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 (S1) Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari sumbangan, bantuan, dorongan dan saran-saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mestika Zed, MA sebagai pembimbing yang sudah meluangkan waktu memberikan arahan, meminjamkan beberapa literatur dan membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum dan Bapak Dr. Rusdi, M.Hum sebagai penguji yang telah memberikan sumbangan pikiran dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Erniwati, S.S, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah beserta bapak atau ibu dosen serta karyawan-karyawati Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

4. Terkhusus untuk Ayahanda Asron Sihombing dan Ibunda Eli Asnah tercinta serta Abang Torkis, Abang Nawir, Kakak Fitri, Laila dan Winda yang telah memberikan nasihat, semangat dan motivasi sehingga membuat penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada para sahabat, terutama Erda Fitriyani, Rahma Yani, Sri Yuardita, Nur Hamiza, S.Pd dan Albani Suryani yang selalu memberi pencerahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada rekan-rekan Sejarah angkatan 2014 yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan dan bantuan yang bapak/ibu, keluarga, sahabat dan rekan-rekan berikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa sejarah serta masyarakat umum lainnya.

Padang, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Kajian Kepustakaan Terkait.....	6
2. Kerangka Konseptual	14
3. Kerangka Berpikir.....	18
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II Masalah Irian Barat dalam KMB	21
A. Latar Belakang Konferensi Meja Bundar	21
B. Isu-isu utama dalam Konferensi Meja Bundar.....	24
C. Kasus Irian Barat (Papua)	30
BAB III Konflik Irian Barat Pasca KMB	39
A. Pandangan Indonesia dan Belanda tentang Irian Barat Pasca KMB...	39
B. Alasan Utama Belanda menolak pengakuan Irian Barat.....	44
BAB IV Isu yang Belum Terselesaikan dan Keterlibatan Amerika Serikat	46
A. Organisasi Papua Merdeka (OPM)	46
B. Kasus Freeport	53

C. Otonomi Khusus (Otsus)	62
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini membahas masalah perebutan Irian Barat (Papua) antara Indonesia dengan Belanda pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Seperti yang kita ketahui, Irian Barat menjadi pusat perhatian semenjak diadakannya KMB. KMB adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda¹ pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949.² Salah satu hasilnya, Belanda menangguhkan Irian Barat sedangkan daerah lainnya diserahkan kepada RIS. Seiring berjalannya waktu, masalah Irian Barat ini tidak kunjung selesai dan memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaiannya, mulai dari tahun 1949 sampai 1969. Alasan Belanda enggan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia menjadi menarik untuk diteliti, mengingat 20 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Masalah Irian Barat bermula dari Konferensi Meja Bundar. Dalam KMB telah disepakati bersama untuk membentuk suatu Uni Indonesia-Belanda di bawah kepemimpinan Ratu Belanda sebagai kepala Uni Indonesia-Belanda, Sukarno akan menjadi Presiden RIS dan Hatta sebagai wakil yang merangkap

¹ M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2008), hlm. 487

² Siswanto Ahmed, “Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1949-1950: Sebuah Kajian Historis”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 2, No. 1 (2005), hlm. 65-66

Perdana Menteri.³ Tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), tetapi tidak termasuk Irian Barat. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam suatu perundingan Uni Indonesia-Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Berdasarkan keputusan tersebut terlihat jelas bahwa Belanda sebenarnya tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.⁴

Akibat penundaan ini, Indonesia masih harus memikul beban sisa-sisa kolonialisme begitu lama. Sengketa Irian Barat berlarut-larut dari tahun 1949 sampai dengan 1969 dan menyedot energi bangsa Indonesia. Energi tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan nasional karena Indonesia sebagai negara yang baru merdeka memerlukan pemberian dan pengembangan diri. Namun kenyataannya setiap kabinet di era Demokrasi Parlementer tahun 1950-1957 sibuk mengatur strategi dan menempatkan sengketa Irian Barat sebagai masalah prioritas. Setelah bekerja keras dan mendapat dukungan internasional, Indonesia dimasa Demokrasi Terpimpin tahun 1962 berhasil menyepakati Perjanjian New York. Perjanjian ini mengatur peralihan kekuasaan Belanda kepada Indonesia atas Irian Barat. Selanjutnya, penyelesaian damai ini dituntaskan melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) di era Demokrasi Pancasila tahun 1969. Dengan demikian, sengketa Irian Barat telah membebani

³ M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2008), hlm. 487

⁴ Nuura Nurida Fasa, “Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951”, *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 138

tiga generasi politik di Indonesia yakni Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila.⁵

Mengingat masalah Irian Barat yang berlarut-larut dan sulit menemukan titik temu atau kesepakatan, penulis tertarik untuk menganalisis alasan keengganan Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Apakah karena alasan Irian Barat memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang yang luar biasa⁶ atau pendapat Siswanto yang menyatakan bahwa penangguhan tersebut merupakan strategi Belanda yang ingin bertahan di Irian Barat. Belanda mengaharapkan Indonesia kacau dan berpeluang kembali (ke Indonesia) melalui Irian Barat⁷ atau juga apakah karena Indonesia lemah dalam perundingan. Dari sudut pandang penulis, perlu rasanya untuk memaparkan semua alasan tersebut dengan mencari berbagai sumber untuk menganalisis alasan dibalik keengganan Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, mengingat betapa lamanya penyelesaian masalah ini.

⁵ Siswanto Ahmed, “Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1949-1950: Sebuah Kajian Historis”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 2, No. 1 (2005), hlm. 67

⁶ Nuura Nurida Fasa, “Perjuang M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951”, *Jurnal AVATARA, e-jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 138

⁷ Siswanto Ahmed, “Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1949-1950: Sebuah Kajian Historis”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 2, No. 1 (2005), hlm. 65-72

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Permasalahan pokok penelitian ini adalah konflik Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat serta isu yang belum terselesaikan, sedangkan batasan temporal penelitian ini difokuskan pada tahun 1949 sampai 2017, karena konflik mengenai Irian Barat dimulai tahun 1949 dan 2017 merupakan titik terang persoalan Irian Barat dikemudian hari. Titik terang tersebut salah satunya mengenai masalah Freeport. Freeport sebelum tahun 2017 sangat tertutup untuk publik tetapi di tahun 2017 Freeport lebih terbuka seperti dalam hal Kontrak Karya (KK) berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hal ini menjadikan pemerintah menjamin kepastian hukum selama berlakunya IUPK, kemudian di tahun 2017 juga terjadi kesepakatan pokok antara Freeport McMoran dengan pemerintah bahwa kepemilikan Indonesia atas saham PT Freeport Indonesia menjadi 51,2% dari sebelumnya hanya 9,36%.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka penulis terfokus membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana konflik Indonesia dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar?
2. Apa argumen Belanda mempertahankan dan Indonesia meminta Irian Barat?
3. Apakah keputusan Belanda di Irian Barat (Papua) terkait kepentingan ekonomi masa depan Belanda di Hindia-Belanda?

4. Bagaimana pengaruh konflik Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda bagi Irian Barat dikemudian hari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan konflik Indonesia dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar, menjelaskan argumen Belanda mempertahankan dan Indonesia meminta Irian Barat, menganalisis alasan Belanda enggan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dan menganalisis pengaruh konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda terhadap Irian Barat dikemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Dapat menambah dan memperkaya khasanah studi sejarah terutama di bidang penyelesaian masalah Irian Barat.
 - b. Dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan kajian sejarah terutama sejarah pemikiran diplomatik terkait konflik Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat.
2. Praktis
 - a. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Papua dalam upaya

merumuskan kebijakan strategis terkait perbedaan pandangan diantara pihak terkait agar mendorong terciptanya kehidupan bernegara yang tentram

- b. Penelitian ini dapat mempertajam daya kritis pembaca.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Kepustakaan Terkait

Di bawah ini akan diuraikan beberapa studi kajian terkait yang relevan dengan penelitian penulis.

Pertama, buku yang ditulis oleh Greg Poulgrain (2017) “Bayang-bayang Intervensi: Perang Siasat John F Kennedy dan Allen Dulles Atas Sukarno”.⁸ Buku ini membahas perang pengaruh antara Jhon F Kennedy (Presiden Amerika Serikat) dengan Allen Dulles (Direktur CIA) terhadap Indonesia. Salah satu topik penting dalam buku ini adalah perihal cadangan emas di Papua yang disembunyikan selama puluhan tahun sejak ekspedisi yang dilakukan oleh geolog berkebangsaan Belanda, Jean Jacques Dozy bersama dua temannya pada tahun 1936. Terkait dengan topik yang diangkat penulis, buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan utama karena memaparkan kekayaan alam Irian Barat yang kemungkinan menjadi salah satu alasan

⁸ Greg Poulgrain. *Bayang-bayang Intervensi: Perang Siasat John F Kennedy dan Allen Dulles Atas Sukarno*. Terjemahan Philip Manhken, dkk (Yogyakarta: Best Publisher, 2017)

Belanda enggan menyerahkan Irian Barat. Disini juga dapat dilihat keterlibatan pihak asing dalam menyelesaikan sengketa Irian Barat.

Kedua, buku yang ditulis oleh Syafaruddin Usman MHD dan Isnawita Din (2010) “*Pasang Surut Sejarah Papua dalam Pangkuan Ibu Pertiwi*”.⁹ Buku ini membahas sejarah lengkap Irian Barat dimulai dari asal mula nama daerahnya, awal mula Irian Barat menarik di mata Belanda, menceritakan kolonialisme di Irian Barat sampai perjuangan Indonesia merebut Irian Barat dan keadaan Irian Barat setelah tergabung ke dalam Indonesia. Terkait dengan topik yang diangkat penulis, buku ini dapat dijadikan rujukan utama karena menceritakan sejarah Irian Barat secara lengkap.

Ketiga, buku yang ditulis Nazaruddin Lubis (1962) “*Irian Barat*”.¹⁰ Buku ini menggambarkan secara sederhana keadaan Irian Barat dan kekayaan alamnya. Fakta-fakta dan angka-angka yang didapat dalam buku ini memberikan gambaran bagaimana Belanda sejak ratusan tahun yang lalu tidak pernah berusaha memajukan rakyat dan daerah ini, terbukti dengan berbagai macam penyakit yang muncul. Pada saat buku ini di cetak, perjuangan pembebasan Irian Barat sedang berlangsung dengan hebatnya. Terkait dengan topik yang diangkat penulis, buku ini dijadikan sebagai sumber utama karena memberikan fakta-fakta mengenai kekayaan alam Irian Barat yang

⁹ Syafaruddin Usman MHD & Isnawita Din. *Pasang Surut Sejarah Papua dalam Pangkuan Ibu Pertiwi* (Yogyakarta: Planet Buku, 2010)

¹⁰ Nazaruddin Lubis. *Irian Barat* (Jakarta: Jajasan Gotong Rojong, 1962)

kemungkinan menjadi salah satu alasan Belanda enggan menyerahkan Irian Barat.

Keempat, jurnal yang ditulis Siswanto “Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat, 1949-1950: Sebuah Kajian Historis”.¹¹ Jurnal ini membahas dua proses diplomasi dalam sengketa Irian Barat. Pertama, dilakukan di Jakarta, Maret 1950. Perundingan ini gagal merumuskan kesepakatan soal Irian Barat. Kedua, perundingan yang dilakukan melalui Konferensi Khusus di Hague, Belanda, bulan Desember 1950. Perundingan ini juga gagal mencapai kesepakatan. Dua kasus ini menjadi bukti ketidakseriusan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia dan ketidakberdayaan Indonesia menghadapi Belanda dalam perjuangan mengembalikan Irian Barat. Dari jurnal ini, kelihatan jelas Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis, jurnal ini membantu penulis dalam memberikan bukti bahwa Belanda memang enggan menyerahkan Irian Barat untuk selanjutnya dicari alasan sesuai dengan topik penelitian penulis.

Kelima, skripsi yang ditulis Rycho Korwa (2013) “Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI”.¹² Skripsi ini membahas proses integrasi Irian Barat ke dalam NKRI yang dimulai dari awal muncuatnya masalah yaitu

¹¹ Siswanto Ahmed, “Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat 1949-1950: Sebuah Kajian Historis”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 65-72

¹² Rycho Korwa, “Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI” (*Skripsi* Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013)

KMB tahun 1949 sampai penyelesaiannya dengan pepera tahun 1969. Disini, penulis bisa mengambil skripsi ini sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Nuura Nurida Fasa (2013) “Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951”.¹³ Jurnal ini membahas bagaimana kebijakan M. Natsir terkait masalah Irian Barat dan respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. M. Natsir pada masa ini menduduki jabatan sebagai perdana menteri pertama NKRI. Untuk menyelesaikan masalah ini, Kabinet Natsir membentuk panitia penyidik untuk melakukan penyelidikan di Irian Barat dan mengirim delegasi untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Usaha ini menemui kegagalan dan menimbulkan mosi tidak percaya dari berbagai pihak terutama Persatuan Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Medan dan Sumbawa yang menuntut pembubaran Kabinet Natsir. Akhirnya M. Natsir mengundurkan diri dan mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno pada 20 Maret 1951. Terkait dengan topik yang diangkat penulis, jurnal ini menjadi tambahan referensi karena memperlihatkan betapa sulitnya penyelesaian Irian Barat, padahal Kabinet Natsir sudah mengupayakan yang terbaik. Pastinya ada alasan yang kuat kenapa Belanda bersikeras enggan menyerahkan Irian Barat.

¹³ Nuura Nurida Fasa, “Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951”, *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 137-149

Dalam penelitian ini, kita bisa mendapatkan pencerahan mengenai hal tersebut.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Maya Nurhasni (2013) “Peranan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dalam Operasi Pembelaan Irian Barat Tahun 1961-1963”.¹⁴ Skripsi ini menyatakan bahwa munculnya permasalahan Irian Barat dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan antara Pemerintah Indonesia dan Belanda dalam menilai status wilayah Irian Barat. Karena itu, telah dilakukan berbagai usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Awalnya selalu diupayakan melalui jalur diplomasi dengan pertimbangan lebih aman dan damai. Namun, berbagai usaha diplomasi yang dilakukan sejak pembentukan Uni Indonesia-Belanda secara bilateral hingga menggunakan bantuan forum internasional seperti PBB masih tidak dapat memberikan jalan keluar atau solusi. Sehingga Indonesia menempuh jalan lain yaitu jalan militer (perang). Skripsi ini menjelaskan bagaimana usaha Indonesia dalam pembebasan Irian Barat melalui operasi militer. Operasi militer ini mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan mendapat bantuan dari PBB sehingga dapat mengantarkan titik terang penyelesaian masalah ini. Berkaitan dengan topik yang diangkat penulis, skripsi ini dapat membantu penulis sebagai bahan penelitian penulis. Skripsi ini

¹⁴ Maya Nurhasni, “Peranan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dalam Operasi Pembelaan Irian Barat Tahun 1961-1963”, (*Skripsi* Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013)

menggambarkan betapa sulitnya penyelesaian Irian Barat sampai melakukan operasi militer.

Kedelapan, buku yang ditulis oleh M. Cholil (1979) “Sejarah Operasi-operasi Pembelaan Irian Barat”.¹⁵ Buku ini membahas persoalan-persoalan disekitar sengketa Irian Barat dan usaha-usaha penyelesaiannya, tetapi yang lebih ditekankan disini adalah usaha pembebasan Irian Barat dari segi militer seperti dikeluarkannya trikora yaitu perintah kepada rakyat Indonesia untuk melaksanakan perjuangan pembebasan Irian Barat secara resmi, dibentuknya komando mandala, dilaksanakannya berbagai operasi-operasi pembebasan Irian Barat. Buku ini membantu penulis sebagai tambahan bahan penelitian penulis.

Kesembilan, buku yang ditulis Amiruddin al Rahab (2010) “Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme”.¹⁶ Buku ini membahas perkembangan keadaan sosial-politik dan HAM di Papua dan relasinya dengan Indonesia. Lebih jauh, buku ini memberikan gambaran mengenai Irian Barat setelah berintegrasi dengan Indonesia. Disini banyak konflik yang terjadi, baik itu masalah kemiskinan, ketidakadilan, trauma akibat tindakan kekerasan, OPM (Organisasi Papua Merdeka), kontroversi mengenai pepera,

¹⁵ M. Cholil. *Sejarah Operasi-operasi Pembelaan Irian Barat* (Jakarta: Depertemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1979)

¹⁶ Amiruddin al Rahab. *Heboh Papua* (Depok: Komunitas Bambu, 2010)

PT Freeport dan sebagainya. Buku ini membantu penulis sebagai tambahan rujukan penelitian penulis.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis Enos H. Rumansara (2015) “Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan yang Manusiawi di Tanah Papua”.¹⁷ Jurnal ini menggambarkan kehidupan sosial dan budaya yang ada di Papua, mulai dari asal usul nama daerahnya, ciri-ciri masyarakatnya, identitas orang Papua seperti bahasa, peralatan hidup, struktur sosial, sistem politik, hak ulayat tanah, mata pencaharian, religi, kesenian dan sebagainya. Jurnal ini dapat membantu penelitian penulis karena mengupas secara mendalam tentang sosial budaya masyarakatnya.

Kesebelas, jurnal yang ditulis oleh Achmad Febrianto (2014) “Alat Utama Sistem Pertahanan dalam Upaya Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1962”.¹⁸ Jurnal ini menggambarkan konflik Indonesia dengan Belanda mengenai permasalahan Irian Barat disertai dengan langkah-langkah yang ditempuh Indonesia untuk membebaskan Irian Barat juga membahas mengenai pengadaan alat utama system persenjataan dalam operasi pembebasan Irian Barat yang dibeli dari Uni Soviet beserta dampaknya.

¹⁷ Enos H Rumansara, “Memahami Kebudayaan Lokal Papua”, *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 1, No. 1 (2015)

¹⁸ Achmad Febrianto, “Alat Utama Sistem Pertahanan dalam Upaya Pembebasan Irian Barat Tahun 1961-1962”, *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 3 (2014)

Kedua belas, surat kabar online yang ditulis oleh Achmad Dwi Afriyadi (2018) “Kisah Pertama Kali Emas Ditemukan di Papua dan Masuknya Freeport”.¹⁹ Surat kabar ini menceritakan tentang keberadaan PT Freeport Indonesia yang tidak terlepas dari penemuan salah satu tambang terbesar di dunia yaitu Papua. Diceritakan bagaimana proses penemuan emas dan proses masuknya Freeport ke Indonesia. Terkait dengan penelitian penulis, ini bisa menjadi rujukan karena menceritakan kekayaan alam Irian Barat yang mungkin menjadi salah satu alasan Belanda enggan menyerahkan Irian Barat.

Ketiga belas, Majalah Tempo yang ditulis oleh Yopie Hidayat (2017) “Mengulang Sejarah Burung Nazar”.²⁰ Majalah ini membahas sengketa Freeport-McMoran melawan pemerintah Indonesia. Diceritakan bahwa Indonesia memberikan tuntutan-tuntutan terhadap PT Freeport Indonesia seperti ketentuan yang mengharuskan Freeport-McMoran menjual saham PT Freeport Indonesia miliknya ke pihak Indonesia hingga 51%, kebijakan larangan impor dan sebagainya. Padahal di pihak lain mempunyai senjata kontrak karya. Segala langkah pemerintah mengubah kontrak dapat memicu perlawanan hukum, meledaknya pengangguran dan mempengaruhi pandangan investor. Jika investor terpengaruh, aliran dana investasi terganggu, ujungnya

¹⁹ Achmad Dwi Afriyadi, “Kisah Pertama Kali Emas Ditemukan di Papua dan Masuknya Freeport”, *Detik*, Jumat, 13 Juli 2018

²⁰ Yopie Hidayat, “Mengulang Sejarah Burung Nazar”, *Majalah Tempo*, Senin, 27 Februari 2017

nilai Rupiah merosot dan sebagainya. Inilah yang menjadi masalah Indonesia, kenapa PT Freeport Indonesia yang berada di wilayah sendiri tapi dikuasai pihak luar.

2. Kerangka Konseptual

Karena kajian ini membahas tentang perebutan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda, maka beberapa konsep kunci yang perlu didefinisikan sebagai berikut.

a. Konflik

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa latin “configure” yang berarti saling memukul. Menurut Antonius dan kawan-kawan konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu.²¹ Jadi, konflik dapat dipahami sebagai pertentangan antar individu, kelompok maupun organisasi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sesuatu.

²¹ Antonius Atasohi Gea, dkk. *Relasi dengan Sesama* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 175

b. Diplomasi

Diplomasi merupakan kegiatan tawar menawar antara dua negara atau lebih guna mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing.²²

Secara teori, diplomasi adalah praktik pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi digunakan sebagai upaya memberi solusi untuk jalan damai.

c. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.²³ KMB membahas mengenai penyerahan kedaulatan Indonesia kepada RIS oleh Belanda.

d. Masalah Irian Barat

Masalah Irian Barat muncul saat diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam KMB, pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada RIS, tetapi tidak termasuk Irian Barat. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam suatu perundingan Uni Indonesia-Belanda dalam waktu satu tahun setelah

²² Reni Windiani, “Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 2 (2010)

²³ Nuura Nurida Fasa, “Perjuangan M. Natsir Merebut Irian Barat 1950-1951”, *Jurnal AVATARA, e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 138

penyerahan kedaulatan.²⁴ Disini, Indonesia dan Belanda berbeda pendapat dalam menanggapi masalah Irian Barat sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya mulai dari tahun 1949-1969.

e. Konflik Politik

Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakannya adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara/ pemerintah, para pejabat politik dan kebijakan. Konflik politik secara sempit dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk memenangkan kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga prilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik. Jadi, konflik politik secara luas adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.²⁵

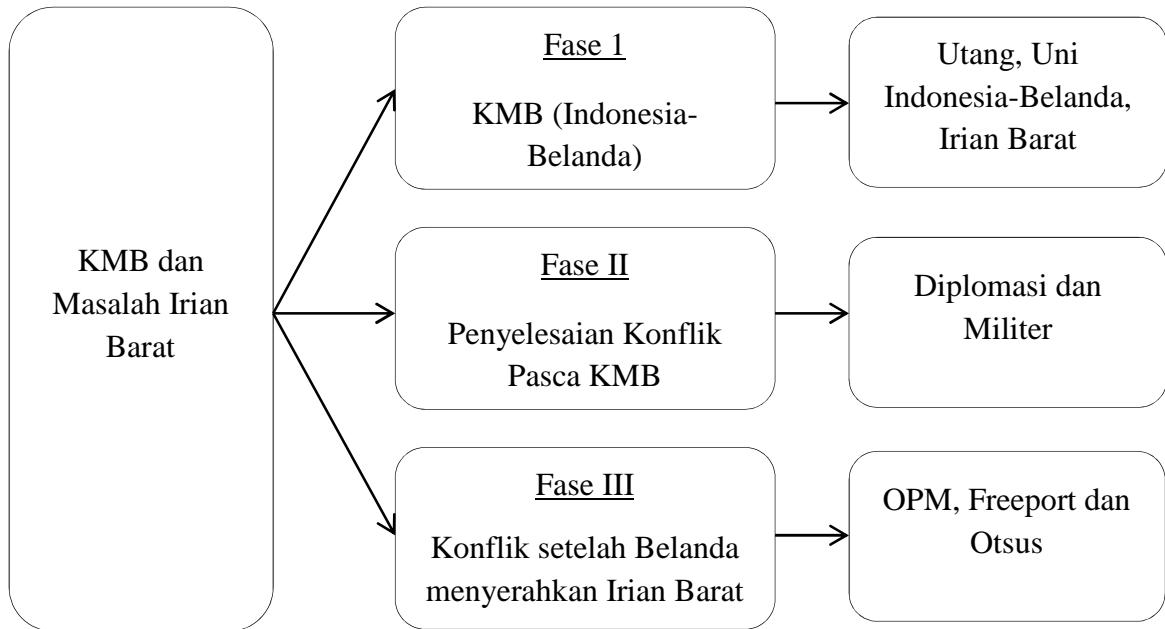
²⁴ *Ibid.*

²⁵ Cholisin & Nasiwan. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 158-159

f. Resolusi Konflik

Salah satu pendekatan untuk menangani konflik yaitu resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Dengan demikian, penyelesaian konflik atau resolusi konflik sesungguhnya adalah proses mendiskusikan sebuah atau serangkaian isu, mencapai kesepakatan dan melaksanakannya kemudian menghilangkan akar penyebab konflik sebisa mungkin. Sejauh perangkat peraturan itu dipandang adil oleh segenap lapisan masyarakat dan tidak ada kelompok mayoritas yang menentang atau berniat mengganti peraturan itu, konflik yang ada bisa dikatakan berhasil diselesaikan.

3. Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dan studi kepustakaan. Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman peristiwa yang diabadikan dalam bentuk dokumen, kaset dan peninggalan-peninggalan masa lampau.²⁶ Metode sejarah merupakan suatu sistem dari cara-cara untuk mencapai kebenaran sejarah, selanjutnya menguji dan menganalisa kebenaran secara kritis,

²⁶ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Gramedia, 1975), hlm. 32

kemudian menyajikan suatu tulisan sejarah dengan bahasa yang baik dan benar, lugas dan ilmiah agar dapat dipahami.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis sebagai berikut.

1. Heuristik. Kegiatan yang dilakukan dalam metode ini adalah mengumpulkan sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, manuskrip dan surat kabar yang sesuai dengan topik penelitian penulis. Di sini, penulis mengumpulkan sumber atau data-data melalui studi kepustakaan. Sumber primer diperoleh dari perpustakaan UNP yaitu Memoir Hatta yang menceritakan mengenai keterlibatannya dalam KMB. Sumber sekunder diperoleh melalui buku-buku yang terdapat di Perpustakaan Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Jurusan serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat. Disamping itu beberapa sumber juga diperoleh dari situs internet berupa jurnal ilmiah, manuskrip dan surat kabar online. Dari berbagai sumber sekunder yang telah diperoleh terdapat buku yang menjadi rujukan utama yaitu buku yang ditulis oleh Greg Poulgrain “Bayang-bayang Intervensi: Perang Siasat Jhon F Kennedy dan Allen Dulles Atas Sukarno”. Selain itu, juga buku yang ditulis oleh Syafaruddin Usman MHD dan Isnawita Din (2010) “Pasang Surut Sejarah Papua dalam Pangkuan Ibu Pertiwi” dan Nazaruddin Lubis (1962) “Irian Barat”.

2. Kritik sumber, yaitu upaya untuk menguji kredibilitas suatu sumber sehingga peneliti dapat mengetahui sumber yang digunakan tersebut asli atau bukan. Kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern yaitu menguji keaslian (autentisitas) sumber secara fisik (materi atau bahan), sedangkan kritik intern yaitu menguji keabsahan isi informasi (realibilitas) dan akurasinya dengan keadaan yang sebenarnya.²⁷
3. Interpretasi, berupaya untuk menetapkan sejauh mana hubungan antara fakta dengan data. Fakta-fakta yang dikumpulkan belum banyak bercerita. Disini, penulis menganalisis dengan menyusun dan menggabungkan fakta satu dengan fakta lain sehingga menjadi suatu kesatuan kalimat yang jelas dan bermakna.
4. Penulisan sejarah, ini merupakan langkah terakhir dari penelitian sejarah. Penulisan sejarah merupakan langkah bagaimana seorang sejarawan mengkomunikasikan hasil penelitiannya untuk dibaca oleh umum. Dalam menulis sejarah berarti seorang sejarawan merekonstruksi terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukannya menjadi suatu cerita sejarah.

²⁷ Mestika Zed. *Diktat Teori & Metodologi Sejarah* (Padang: UNP Press, 2014), hlm. 42

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konferensi Meja Bundar menghasilkan kesepakatan mengenai penyerahan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat oleh pemerintah Belanda. Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan tersebut, Indonesia dan Belanda harus menyelesaikan beberapa masalah yang muncul dalam KMB. Masalah tersebut diantaranya, yang pertama masalah utang, di sini Indonesia menyetujui untuk membayar utang Belanda sejumlah f. 3.400 juta gulden, delegasi Indonesia menyadari hal itu sebagai harga dari suatu penyerahan kedaulatan. Kedua, masalah Uni dalam hubungan Uni Indonesia-Belanda. Uni disini merupakan forum kerjasama bukan *superstaat* (negara diatas negara). Ketiga, masalah Irian Barat. Disebabkan karena belum tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dan keterbatasan waktu maka Irian Barat ditangguhkan. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.

Semestinya pada akhir tahun 1950, Belanda sudah mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia, akan tetapi keputusan KMB yang berkaitan dengan Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tetap ingin mempertahankan Irian Barat, tetapi di sisi lain Indonesia menginginkan Irian Barat masuk kedalam wilayahnya. Adapun argumen Belanda mempertahankan Irian Barat diantaranya: ras penduduk

Irian Barat berbeda dari ras penduduk Indonesia lainnya, daerah Irian Barat masih terbelakang dan penyerahan Irian Barat kepada Indonesia bertentangan dengan penduduk asli. Hal ini ditanggapi Indonesia dengan menyatakan Irian Barat bagian dari Indonesia. Ini berdasarkan hak alamiah atau hak mutlak bahwa daerah yang dikuasai de facto oleh pemerintah Belanda ialah bagian tanah air Indonesia yang dahulu dinamai Hindia-Belanda di zaman kolonial. Hak mutlak itu diwujudkan dalam kalimat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia” dengan termasuk Irian Barat di dalamnya.

Perbedaan pandangan diantara kedua negara dalam menilai status Irian Barat menyebabkan masalah Irian Barat sulit untuk diselesaikan. Belanda tetap ingin mempertahankan Irian Barat. Adapun alasan utama Belanda menolak pengakuan Irian Barat karena Irian Barat (Papua) memiliki kekayaan alam berupa deposit emas dan tembaga. Analisis yang dilakukan di Belanda menunjukkan bahwa bobot kadar emas di Papua dua kali lipat dari pertambangan terbesar pada waktu itu, tambang Witwatersrand di Afrika Selatan. Hal ini menjadikan Papua sebagai tambang emas terbesar di dunia. Ketika pertambangan dimulai beberapa dekade kemudian, ternyata kekayaannya lima kali lipat dari penemuan awalnya yang dilakukan oleh JJ. Dozy (geologis Belanda) beserta dua temannya pada tahun 1936. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa kekayaan alam terutama emas di Irian Barat sangat melimpah sehingga siapapun yang menguasai daerah ini akan

mendapat keuntungan yang sangat besar bahkan lebih untuk membangun perekonomiannya kearah yang lebih maju. Dampak politik “El Dorado” (Kota Emas) ini tidak ada bandingnya, berlangsung hingga kini antara perusahaan pengelola tambang, Freeport McMoran dan pemerintah Indonesia.

Konflik Irian Barat yang berlarut-larut antara Indonesia dan Belanda diselesaikan dengan beberapa cara seperti diplomasi yang tidak membawa hasil, kemudian dilanjutkan dengan militer yang menghasilkan Perjanjian New York dan diakhiri dengan Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 yang menyatakan bahwa penduduk Irian Barat bergabung dengan NKRI. Masalah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda yang akhirnya dapat diselesaikan ternyata dikemudian hari memunculkan masalah baru yang lebih kompleks. Kali ini, masalah Irian Barat terjadi antara pemerintah Indonesia dengan sebagian penduduk Irian Barat dan Amerika Serikat. Masalah baru tersebut adalah OPM, Kasus Freeport dan Otsus.

B. Saran

Melalui tulisan ini, penulis berharap agar pembangunan di Papua semakin lebih maju karena seperti yang kita ketahui Papua telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bangsa melalui sumber daya alam yang dimilikinya seperti emas, tembaga dan sebagainya. Semoga masalah-masalah yang dipaparkan penulis dalam penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin al Rahab. 2010. *Heboh Papua*. Depok: Komunitas Bambu
- Antonius Atasokhi Gea, dkk. 2005. *Relasi dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Cholisin & Nasiwan. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Deliar Noer. 1991. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES
- Frits Bernard Ramandey & Lucky Ireeuw. 2005. *Profil Otonomi Khusus Papua*. Jayapura: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Gramedia
- Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Terjemahan Nin Bakdi Soemanto. Surakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mohammad Hatta. 2002. *Memoir*. Jakarta: Yayasan Hatta
- Mohammad Hatta. 2015. *Untuk Negeriku 3: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- M. Cholil. 1979. *Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Depertemen Pertahanan-Keamanan